

HUBUNGAN KETERSEDIAAN PANGAN DAN KETERATURAN PENERIMAAN RASKIN DENGAN STATUS KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA PENERIMA RASKIN

Santi¹, Dini Ririn Andrias²

^{1,2}Departemen Gizi Kesehatan

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: anadwisanti@yahoo.com

ABSTRAK

Ketersediaan pangan merupakan salah satu subsistem yang harus dipenuhi agar terbentuk ketahanan pangan rumah tangga yang baik. Penerimaan beras untuk orang miskin (raskin) secara teratur diharapkan dapat membantu masyarakat miskin untuk mencukupi ketersediaan pangan pokoknya secara berkala. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan ketersediaan pangan dan keteraturan penerimaan raskin dengan status ketahanan pangan rumah tangga penerima raskin. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan rancang bangun *cross sectional*. Besar sampel adalah 42 rumah tangga penerima raskin di Kelurahan Tompokersan, Kabupaten Lumajang yang dipilih menggunakan teknik *simple random sampling*. Data dianalisis menggunakan uji *Spearman Correlation*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 47,6% rumah tangga berada pada kondisi rawan pangan tanpa kelaparan dan terdapat hubungan antara keteraturan penerimaan raskin dengan status ketahanan pangan rumah tangga ($p = 0,002$ dengan $r = 0,458$). Sebaliknya, tidak terdapat hubungan antara ketersediaan pangan dengan status ketahanan pangan rumah tangga ($p = 0,071$). Kesimpulan dari penelitian ini adalah keteraturan penerimaan raskin dapat meningkatkan status ketahanan pangan rumah tangga. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlu diadakannya pemantauan terhadap jadwal penerimaan raskin, dan mengupayakan agar raskin dapat diterima secara teratur oleh rumah tangga sasaran.

Kata kunci: ketahanan pangan rumah tangga, ketersediaan pangan, raskin

ABSTRACT

Food availability is one of the subsystem that should be fulfilled in order to achieve good household food security. Regularity of subsidized rice receipt was expected to help the poor to fulfill the need of their staple foods stock periodically. The purpose of this study was to analyze association between food availability and regularity of subsidized rice receipt to household food security among subsidized rice for the poor recipient households. This study was an observational analytic research using cross sectional design. Forty-two households who received subsidized rice for the poor in Tompokersan village, Lumajang regency were selected using simple random sampling technique. Data analyzed by Spearman Correlation test. The result showed that the household was insecure without hunger (47.6%) and there was association between regularity of subsidized rice receipt to household food security status ($p = 0.002$ and $r = 0.458$). Conversely, there was no association between food availability and household food security status ($p = 0.071$). The conclusion of this study was regularity of subsidized rice receipt could increase household food security status. Recommendations that can be given are monitor the schedule of subsidized rice and striving for the subsidized rice to be able to regularly accepted.

Keywords: food availability, household food security, subsidized rice

PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata,

dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup merupakan aspek penting untuk membentuk ketahanan pangan yang baik bagi suatu rumah tangga. Ketersediaan pangan dapat diperoleh dari produksi sendiri, pasokan

pangan dari luar (impor), memiliki cadangan pangan, dan adanya bantuan pangan (Adriani dan Wirjatmadi, 2012).

Indonesia dinilai belum kokoh terkait ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangannya. Banyak penduduk Indonesia yang belum mendapatkan kebutuhan pangan yang mencukupi, hal ini terutama terjadi pada rumah tangga yang tergolong miskin, di mana rumah tangga miskin pada umumnya memiliki ketersediaan pangan yang terbilang rendah. Berdasarkan hasil perhitungan *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 2005, di Indonesia terdapat sekitar 6% penduduk yang menderita kelaparan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 menyebutkan bahwa pada tahun 2009 jumlah penduduk sangat rawan pangan mencapai 14,4% meningkat dibandingkan tahun 2008 yaitu 11,1%. Pada tahun 2012 masih terdapat 19,4% penduduk Indonesia mengalami kondisi sangat rawat pangan dan apabila dibiarkan terjadi selama berbulan-bulan akan menjadi rawan pangan akut yang menyebabkan kelaparan (World Bank, 2013).

Untuk mengurangi angka kerawanan pangan di Indonesia, pemerintah sudah berupaya dengan memberikan beberapa bantuan kepada masyarakat yang tergolong miskin, salah satunya adalah bantuan pangan berupa bantuan raskin. Penerimaan raskin secara teratur diharapkan dapat membantu ketersediaan pangan rumah tangga miskin tercukupi terutama pangan pokok dalam hal ini beras. Raskin merupakan bagian tak terpisahkan dari program ketahanan pangan karena raskin berkontribusi sebesar 44% untuk membantu rumah tangga rawan pangan terutama di daerah pedesaan (Hastuti *et al.*, 2012). Proporsi rumah tangga rawan pangan yang berada di daerah pedesaan masih terbilang tinggi yaitu sebesar 4% jika dibandingkan dengan daerah perkotaan yang sebesar 1% (International Labour Organization, 2009).

Jumlah penduduk yang berada dalam kondisi rawan pangan di Provinsi Jawa Timur mencapai 19,3% pada tahun 2005, mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi 21,6% (Dewan Ketahanan Pangan, 2010). Beberapa kabupaten

di Jawa Timur tergolong dalam wilayah rawan pangan yang salah satunya adalah Kabupaten Lumajang, di mana Kabupaten Lumajang termasuk dalam wilayah kawasan prioritas kedua yang mengalami situasi rawan pangan di Jawa Timur dengan persentase kejadian sebesar 24,7% (Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang, 2011).

Salah satu penyebab terjadinya kondisi rawan pangan di wilayah pedesaan seperti di Kabupaten Lumajang karena angka kemiskinan di pedesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Pada tahun 2011 angka kemiskinan Kabupaten Lumajang mencapai 11,2%, angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 12,1% (Survei Keluarga Berencana, 2012). Apabila angka kemiskinan semakin meningkat maka kestabilan ketahanan pangan dapat terganggu (Yuwianti, 2013). Seiring dengan meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Lumajang, jumlah penerima raskin juga mengalami peningkatan. Salah satu kelurahan di Kabupaten Lumajang yang menerima jatah raskin paling banyak tahun 2014 adalah Kelurahan Tompokersan yaitu sekitar 581 penerima raskin, sedangkan jumlah rumah tangga miskin pada tahun yang sama 989 rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan raskin di Kelurahan Tompokersan baru mencapai 58,8% sehingga masih belum mampu mengatasi kerawanan pangan yang terjadi di Kabupaten Lumajang.

Ketersediaan beras di Provinsi Jawa Timur selama tiga tahun terakhir (2011–2013) mengalami surplus. Hal ini dibuktikan dengan produksi beras pada tahun 2013 yang mencapai 7.062.204 ton sedangkan kebutuhan berasnya hanya membutuhkan 3.598.007 ton (Sutijo *et al.*, 2013). Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten penghasil beras terbesar di Provinsi Jawa Timur, di mana produksi gabah kering gilingnya pada tahun 2012 mencapai 448 ribu ton. Hal tersebut seharusnya dapat menjamin ketersediaan pangan terutama pangan pokok di Kelurahan Tompokersan tercukupi, namun kenyataannya ketersediaan pangan pokok rumah tangga miskin sebagian besar masih bergantung pada bantuan raskin yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini juga yang menyebabkan keteraturan penerimaan raskin menjadi faktor penting untuk memenuhi ketersediaan pangan beras di rumah tangga tersebut.

Raskin yang diterima secara teratur dapat menjamin ketersediaan pangan pokok, berupa beras, di rumah tangga tersebut tercukupi secara stabil, sehingga apabila ketersediaan pangan rumah tangga tercukupi diharapkan dapat memperbaiki kondisi rawan pangan rumah tangga berada dalam kondisi tahan pangan (Santi, 2015). Berdasarkan masalah yang diuraikan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai hubungan ketersediaan pangan dan keteraturan penerimaan raskin dengan status ketahanan pangan rumah tangga penerima raskin di Kelurahan Tompokersan, Kabupaten Lumajang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan ketersediaan pangan dan keteraturan penerimaan raskin dengan status ketahanan pangan rumah tangga penerima raskin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan rancang bangun *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga penerima raskin tahun 2014 di Kelurahan Tompokersan, Kabupaten Lumajang yang telah melalui proses *screening* (penyaringan) dengan kriteria inklusi rumah tangga yang hanya menerima bantuan raskin saja tanpa menerima bantuan rutin lain, baik bantuan pangan maupun non pangan yaitu sejumlah 124 rumah tangga.

Responden penelitian terpilih secara acak menggunakan teknik *simple random sampling* di mana setiap anggota atau unit dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai responden penelitian. Besar responden sebanyak 42 rumah tangga diperoleh dari hasil perhitungan menggunakan rumus untuk penelitian observasional dengan nilai standar normal $Z = 1,96$, $\alpha = 0,05$, proporsi = 0,8, dan besar penyimpangan yang masih bisa ditolerir sebesar 0,1. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengundi semua anggota atau unit dari populasi penelitian menggunakan aplikasi *random number generator*. Penelitian dilakukan pada bulan Mei – Juni 2015.

Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari komisi etik nomor 251-KEPK fakultas kesehatan masyarakat Universitas Airlangga. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan instrumen kuisioner terstruktur dan penilaian status ketahanan pangan rumah tangga menggunakan *form United State Household Food Security Survey Modul (US-HFSSM)*. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan tabel frekuensi dan tabulasi silang terhadap variabel ketersediaan pangan (stok beras), keteraturan penerimaan raskin dan status ketahanan pangan rumah tangga. Untuk menganalisis hubungan digunakan uji statistik *Spearman Correlation*.

Ketersediaan pangan dilihat dari ketersediaan stok beras di rumah per hari dalam satu minggu terakhir kemudian dibandingkan dengan unit ekivalensi dewasa seluruh anggota rumah tangga, hasilnya dibandingkan dengan konsumsi normatif per individu (300 gram per hari), dikatakan kurang apabila ketersediaan pangan kurang dari konsumsi normatif dan dikatakan cukup apabila ketersediaan pangan lebih dari sama dengan konsumsi normatif. Keteraturan penerimaan raskin dilihat dari persepsi responden terkait teratur tidaknya dalam menerima raskin setiap bulannya, dikelompokkan menjadi teratur dan tidak teratur (Santi, 2015). Status ketahanan pangan rumah tangga diukur menggunakan *form United State Household Food Security Survey Modul (US-HFSSM)* yang kemudian hasil perhitungan nilainya diklasifikasikan menjadi tahan pangan apabila nilainya antara 0-2, rawan pangan tanpa kelaparan antara 3-7, rawan pangan dengan derajat kelaparan sedang antara 8-12, dan rawan pangan dengan derajat kelaparan berat apabila nilainya antara 13-18 (Bickel *et al.*, 2000).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketersediaan pangan rumah tangga dapat dilihat dari ketersediaan stok beras di rumah. Keteraturan penerimaan raskin dilihat dari teratur tidaknya rumah tangga sasaran dalam menerima raskin yang telah didistribusikan selama ini. Penilaian status ketahanan pangan diklasifikasikan menjadi empat. Distribusinya dapat dilihat pada Tabel 1:

Tabel 1. Distribusi Responden Menurut Ketersediaan Pangan dan Keteraturan Penerimaan Raskin di Kelurahan Tompokersan, Kabupaten Lumajang Tahun 2015

Variabel	Jumlah	Persentase (%)
Ketersediaan Pangan (stok beras):		
Kurang	33	78,6
Cukup	9	21,4
Keteraturan Penerimaan Raskin:		
Teratur	26	61,9
Tidak Teratur	16	38,1
Status Ketahanan Pangan:		
Tahan Pangan	8	19
Rawan Pangan Tanpa Kelaparan	20	47,6
Rawan Pangan dengan Derajat Kelaparan Sedang	8	19
Rawan Pangan dengan Derajat Kelaparan Berat	6	14,3

Tabel 1 menunjukkan ketersediaan pangan rumah tangga yang dilihat dari ketersediaan stok beras sebagian besar (78,6%) tergolong kurang dan hanya 21,4% yang tergolong cukup. Ketersediaan pangan rumah tangga secara kuantitas diukur dari stok pangan pokok (Aini, 2010) hal ini sesuai dengan konsep penelitian ini di mana ketersediaan pangan diukur dari ketersediaan stok pangan pokok responden yaitu beras. Ketersediaan pangan mengacu pada pangan yang cukup dan tersedia dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sehingga dapat dilihat pula kecukupan konsumsi normatif pada masing-masing individu (Soemarno, 2010).

Sebagian besar rumah tangga penerima raskin di Kelurahan Tompokersan memiliki ketersediaan pangan yang kurang, hal ini akan menyebabkan konsumsi makanan anggota rumah tangga juga tidak tercukupi sehingga dapat berpengaruh pada status gizi dan kesehatan anggota rumah tangga. Ketersediaan pangan yang kurang dalam hal ini ketersediaan beras kemungkinan karena kebanyakan responden menjual beras yang diperoleh dari bantuan raskin setempat untuk memenuhi kebutuhan non-pangan seperti melunasi hutang (Santi, 2015). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden, terdapat beberapa warung sembako di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka yang memang menerima penjualan

beras dari program raskin dengan harga jual yang lebih tinggi dari harga tebusan raskin tersebut.

Terdapat 61,9% rumah tangga yang telah menerima raskin secara teratur, namun masih terdapat 38,1% rumah tangga yang berpersepsi bahwa penerimaan raskin tidak teratur. Raskin merupakan bantuan yang bersifat *multi objektif* karena di samping sebagai pendukung bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, raskin juga diharapkan dapat berpengaruh dalam menjaga ketahanan pangan keluarga miskin (Sujianto *et al.*, 2012).

Sebagian besar responden sudah menerima raskin secara teratur, meskipun masih terdapat beberapa responden yang mengeluhkan terkadang menerima raskin tidak teratur setiap bulan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden, jadwal pengambilan raskin tidak teratur, terkadang setiap bulan namun terkadang tiga bulan sekali, di mana jumlah jatah raskin yang terkumpul dari bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diambil dalam satu kali. Menurut Mananoma (2012) terjadinya keterlambatan penyaluran raskin menyebabkan penerima raskin tidak dapat mencukupi kebutuhan makanan pokoknya yaitu beras seperti biasanya, sehingga penghasilan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan lain seperti keperluan dapur, biaya pendidikan dan biaya kesehatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, akibatnya untuk memenuhi kebutuhan non pangan tersebut digunakan sistem hutang kepada orang lain. Terdapat 19% rumah tangga yang memiliki status ketahanan pangan dalam kategori tahan pangan, sedangkan sebesar 80,9% rumah tangga berada dalam kondisi rawan pangan dengan kategori rawan pangan tanpa kelaparan sebesar 47,6%, terdapat 19% rumah tangga berada dalam kondisi rawan pangan dengan derajat kelaparan sedang dan terdapat 14,3% rumah tangga yang berada dalam kondisi rawan pangan dengan derajat kelaparan berat. Rumah tangga penerima Raskin adalah rumah tangga miskin yang berisiko mengalami rawan pangan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aini (2010) di Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan bahwa sebagian besar rumah tangga miskin berada dalam keadaan rawan pangan. Berdasarkan wawancara terhadap responden, rumah tangga yang berada

Tabel 2. Distribusi Status Ketahanan Pangan Rumah Tangga Menurut Ketersediaan Pangan dan Keteraturan Penerimaan Raskin di Kelurahan Tompokersan, Kabupaten Lumajang Tahun 2015

Kategori	Status Ketahanan Pangan Rumah Tangga								Total	p	
	Tahan Pangan		Rawan Pangan Tanpa Kelaparan		Rawan Pangan dengan Kelaparan Sedang		Rawan Pangan dengan Kelaparan Berat				
	n	%	n	%	n	%	n	%			
Ketersediaan Pangan (stok beras):											
Kurang	3	9,1	18	54,5	8	24,2	4	12,1	33	100	0,071
Cukup	5	55,6	2	22,2	0	0	2	22,2	9	100	
Keteraturan Penerimaan Raskin:											
Teratur	8	30,8	12	46,2	6	23,1	0	0	26	100	0,002
Tidak Teratur	0	0	8	50	2	12,5	6	37,5	16	100	

pada kondisi rawan pangan ini menyatakan bahwa mereka terkadang merasa cemas bahan makanan yang dimiliki akan habis sebelum memiliki uang. Selain itu, mereka juga menghindari kelaparan anggota rumah tangganya dengan mengurangi porsi makan, melewatkan waktu makan atau bahkan beberapa di antara mereka mengaku pernah tidak makan seharian agar anggota keluarga yang lain seperti anak mereka tercukupi kebutuhan makannya.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dilihat dari ketersediaan stok beras, rumah tangga yang memiliki ketersediaan pangan dalam kategori kurang berada dalam kondisi rawan pangan tanpa kelaparan sebesar 54,5%, sedangkan rumah tangga yang memiliki ketersediaan pangan cukup berada dalam kondisi tahan pangan sebesar 55,6%. Berdasarkan analisis statistik menggunakan uji korelasi *Spearman* dengan $\alpha = 0,05$ diperoleh nilai $p = 0,07$ yang berarti tidak terdapat hubungan antara ketersediaan pangan dengan status ketahanan pangan rumah tangga penerima raskin. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aini (2010) di Sidoarjo yang juga menyatakan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara ketersediaan pangan yang dilihat dari stok pangan pokok dengan status ketahanan pangan rumah tangga. Pada kenyataannya masih ada beberapa responden yang tidak memanfaatkan bantuan raskin yang didapat sebagai persediaan pangan pokok di rumah, karena mereka menjual beras yang didapat dari bantuan raskin untuk memenuhi kebutuhan darurat lainnya. Hal ini dapat menjadi

penyebab ketersediaan pangan yang dilihat dari stok beras tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan status ketahanan pangan rumah tangga. Padahal Pemberian raskin merupakan salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan rumah tangga miskin terkait ketersediaan pangan (Susilowati, 2014).

Keteraturan penerimaan raskin dilihat berdasarkan persepsi responden tentang teratur tidaknya menerima bantuan raskin selama ini. Rumah tangga yang teratur maupun tidak teratur menerima raskin berada dalam kondisi rawan pangan tanpa kelaparan dengan persentase secara berturut-turut sebesar 46,2% dan 50% namun masih terdapat 37,5% rumah tangga yang tidak teratur menerima raskin berada dalam kondisi rawan pangan dengan derajat kelaparan berat. Berdasarkan analisis statistik yang dilakukan menggunakan uji korelasi *Spearman* dengan $\alpha = 0,05$ diperoleh nilai $p = 0,002$ yang artinya terdapat hubungan antara keteraturan penerimaan raskin dengan status ketahanan pangan rumah tangga penerima raskin. Untuk kuat hubungan diperoleh nilai 0,458 yang artinya ada hubungan yang kuat antara keteraturan penerimaan raskin dengan status ketahanan pangan rumah tangga penerima raskin.

Arah hubungan menunjukkan arah positif yang artinya searah sehingga terdapat kecenderungan rumah tangga yang teratur menerima raskin cenderung berada dalam kondisi tahan pangan, sebaliknya rumah tangga yang tidak teratur menerima raskin cenderung berada dalam kondisi rawan pangan. Hal ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Soblia (2009) di Banjarnegara yang menyatakan bahwa adanya bantuan baik bantuan materi maupun non materi dapat berpengaruh terhadap status ketahanan pangan rumah tangga, namun hal ini tidak lepas dari teratur tidaknya bantuan tersebut diberikan kepada rumah tangga. Bantuan yang diberikan secara teratur akan membantu rumah tangga menyediakan sumber kebutuhan keluarganya secara berkesinambungan sehingga kebutuhan masing-masing individu dapat terpenuhi secara stabil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ketersediaan stok beras bukan merupakan satu-satunya faktor penentu status ketahanan pangan rumah tangga karena di antara keduanya tidak terdapat hubungan. Berbeda antara keteraturan penerimaan raskin dengan status ketahanan pangan rumah tangga yang terdapat hubungan di antara keduanya.

Keteraturan penerimaan raskin dapat meningkatkan status ketahanan pangan rumah tangga di mana semakin teratur menerima raskin maka cenderung rumah tangga tersebut berada dalam kondisi tahan pangan, sebaliknya semakin tidak teratur menerima raskin maka rumah tangga tersebut cenderung berada pada kondisi yang rawan pangan. Pemerintah lokal perlu melakukan pemantauan terhadap jadwal penerimaan raskin, dan mengupayakan agar raskin dapat diterima secara teratur oleh rumah tangga sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, M., & Wirjatmadi, B. (2012). *Pengantar Gizi Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Aini, N. (2010). Ketahanan Pangan Rumah Tangga pada Keluarga Miskin di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. *Media Gizi Indonesia*, 8(1), 52–61.
- Badan Pusat Statistik. (2009). *Angka Rawan Pangan*. Diakses dari <http://www.bps.go.id/>
- Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang. (2011). *Persentase Rawan Pangan Lumajang*. Diakses dari <http://id.famedpages.com/www/Kantor+Ketahanan+Pangan+Kab.+Lumajang>.
- Bickel, G., Nord, M., Price, C., Hamilton, W., & Cook, J. (2000). *Guide to Measuring Household Food Security*. Alexandria, VA: United States Department of Agriculture. Diakses dari <http://www.fns.usda.gov/sites/default/files/FSGuide.pdf>
- International Labour Organization (ILO). (2009). Indonesian Food and Nutrition Security Monitoring System East Java Province. *Food and Nutrition Security Bulletin Issue*, 2: 2–4. Diakses dari: <http://home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp210761.pdf>
- DKP. (2010). *Indonesia Tahan Pangan dan Gizi*. Jakarta, Indonesia: DKP.
- Hastuti, Sulaksono, B., & Mawardi, S. (2012). Tinjauan Pelaksanaan Raskin dalam Mencapai Enam Tepat. *Lembaga Penelitian SMERU*, 1. Diakses dari <http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/raskinmencapaienamtepat.pdf>.
- Mananoma, C. (2012). Implementasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Desa Tola Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 1. Diakses dari: <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/index>.
- Santi. (2015). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Penerima Raskin (Studi di Kelurahan Tompokersan, Kabupaten Lumajang)* (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Universitas Airlangga, Surabaya.
- Sujianto, Ernawati, As'ari, H., & Mayarni. (2012). Implementasi Program Raskin Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(2), 59–141.
- Survei Keluarga Berencana. (2012). *Kabupaten Lumajang dalam Angka*. Diakses dari <http://lumajangkab.go.id/LDA%202014.pdf>
- Susilowati, H. (2014). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Srandakan Bantul* (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta). Diakses dari <http://eprints.uny.ac.id/16097/>
- Sutijo, B. dan Indrawati, F. (2012). Pemodelan Jumlah Beras Untuk Jawa Timur dengan Pendekatan Fungsi Transfer. *Jurnal Sains dan Seni*, 1(1), ISSN: 2301-928X. Diakses dari: ejournal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/download/776/239.
- Soblia, E. (2009). *Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga, Kondisi Lingkungan, Morbiditas, dan Hubungannya dengan Status Gizi Anak Balita Pada Rumah Tangga Di Daerah Rawan Pangan Banjarnegara, Jawa Tengah*. (Skripsi,

- Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta)
Diakses dari: <http://eprints.uny.ac.id/1507/>
- Soemarno. (2010). Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pangan Rumah Tangga Pedesaan. *Jurnal Argo Ekonomi*. Diakses dari: <http://marno.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/strategi-pemenuhan-kecukupanpanganrumahtangga.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 18. (2012). *Pengertian Ketahanan Pangan*. Jakarta, Indonesia: UU Nomor 18 pasal 1.
- World Bank. (2014). Pangan Untuk Indonesia. *Indonesia Policy Briefs*. Diakses dari <http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/2800161106130305439/617331-1110769011447/810296-1110769073153/feeding.pdf>
- Yuwianti, I. (2013). *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Lumajang*. (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Universitas Jember, Jember.